



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2019



KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kebumen tahun 2016 – 2021.

Penyusunan LKjIP ini sebagai implementasi dari Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kebumen ini merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2019 merupakan evaluasi terhadap berbagai program kerja



pada tahun 2019, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tahun 2019, dengan harapan dapat menjadi sumber/informasi pengambilan keputusan diwaktu – waktu mendatang.

Kebumen, 31 Januari 2020

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

NURTAQWA SETYABUDI,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650521 199203 1 009



HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A.Latar belakang	1
B. Gambaran SKPD	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi	5
D. Sistematika Penyusunan Lakip.....	7

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kerja.....	9
B. Strategis danKebijakan.....	10
C. Indikator Kinerja Utama	12

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran.....	27

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	37
B. Saran dan Rekomendasi.....	37



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah..... 16

Tabel 3.2. Capaian indikator utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik18

Tabel 3.2.1 Capaian kinerja sasaran / indikator sasaran.....22

Tabel 3.3 Realisasi anggaran program / kegiatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen.....29



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Lembaga Teknis Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut telah disusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dengan Visi : *“Kebumen yang Demokratis dan Kondusif”*. Guna mewujudkan visi tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen berupaya secara maksimal untuk melaksanakan program – program melalui kegiatan – kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategisnya.

Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra maka pada tahun 2019 telah direncanakan dan dilaksanakan pembiayaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 untuk pencapaian 7 (tujuh) program, yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program pengembangan data / informasi.
4. Program pengembangan data / informasi / statistik daerah.
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
6. Program peningkatan peran serta kepemudaan.



7. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
8. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
9. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
10. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
11. Program pendidikan politik masyarakat.

Dari uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 sasaran yang ditetapkan secara umum dapat tercapai. Sasaran kegiatan juga tetap dapat dilaksanakan meskipun ke depan harus secara terus menerus dilaksanakan penyempurnaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen tetap memiliki dedikasi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dari pencapaian sasaran di tahun 2019 dapat diketahui bahwa ada beberapa sasaran yang dicanangkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang belum dapat direalisasikan karena beberapa faktor termasuk didalamnya karena keterbatasan anggaran.

Kendala lain yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain:



1. Minimnya jumlah, kompetensi dan kualifikasi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
2. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menunjang pelaksanaan kerja dalam rangka pencapaian kinerja.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri;
2. Penataan basis data dan informasi baik data Ormas/LSM, Partai Politik, dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akurat sebagai penunjang pelaksanaan kerja yang lebih optimal.

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah sebagai organisasi publik harus lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Penyusunan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana dalam Permenpan dan RB nomor 53 tahun 2015 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Setiap SKPD diharapkan dapat membuat rencana strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja (Performance Accountability Report) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.



Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2019 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Prepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka merenspon tuntutan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan Good Government Governance (GGG), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan umum.

Selanjutnya diharapkan LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tahun 2019 ini dapat digunakan



sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta umpan balik bagi peningkatan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada tahun berikutnya dan dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Kabupaten Kebumen selanjutnya.

B. Gambaran SKPD

Kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sesuai dengan Perda Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 maka terdiri dari Kepala Kantor yang dibantu oleh satu orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan tiga kepala seksi : Kepala Seksi Ketahanan Bangsa, Kepala Seksi Idiologi dan Kewaspadaan dan Kepala Seksi politik Dalam Negeri.

Gambar : 1.1.
Bagan Susunan Organisasi





Adapun Jumlah sumberdaya manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan tupoksi dengan jumlah PNS 16 orang dengan rincian struktural maupun fungsional umum berdasarkan jenis kepegawaian sebagaimana tercantum dalam diagram dibawah ini :

1. Struktural :

- a. Kepala Kantor eselon III a.
- b. Kasubag Tata Usaha eselon IV a.
- c. Kepala Seksi Katahanan Bangsa eselon IV a.
- d. Kepala Seksi Idiologi dan Kewaspadaan eselon IV a.
- e. Kepala Seksi Politik Dalam Negeri eselon IV a.

2. Keadaan Pegawai

- a. Menurut Golongan

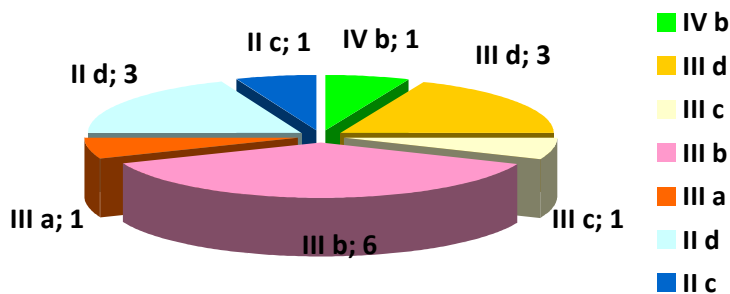


Diagram 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

TMT. 01 Agustus 2019 pensiun 1 (satu) orang.



b. Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

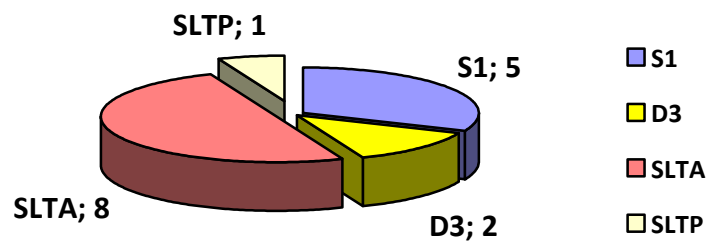


Diagram 1.2.Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Sesuai Pasal 2 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Bupati ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.



3. Pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan dan partai politik.
4. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum.
5. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan.
6. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi di bidang ideologi dan kewaspadaan.
7. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang politik dalam negeri.
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor.
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi tersebut maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen maka peranan dalam pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pembentukan organisasi dan tata kerja sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 148 Tahun 2011 berperan sangat penting di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan kegiatannya bertujuan ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suasana yang aman, nyaman tenteram dan



kondusif, demokratis dan ikut serta dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan miras.

D. Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan hal-hal umum tentang profil, gambaran umum tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Bab II. Perencanaan Kinerja.

Menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi



Menyajikan analisa capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kebumen dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut;

1. perbandingan antara target dan realisasi kinerja;
2. perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Rencana Strategis (Renstra);
4. analisis (penyebab) keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi pemecahan yang telah dilakukan;
5. analisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

E. Bab IV. Penutup

Kesimpulan atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerjanya.



A. RENCANA KERJA

1. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2019 berikut program dan kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

2. Visi dan Misi.

a. Visi

”Terwujudnya Kebumen yang Demokratis dan Kondusif”

b. Misi

- 1) Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan melalui peningkatan pengetahuan generasi muda,



pelajar dan masyarakat dalam demokrasi, budaya, agama untuk terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengamanan lingkungan; dan
- 3) Membangun jejaring informasi tentang situasi daerah

B. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

1. Strategi yang ingin dicapai dalam pembangunan guna mewujudkan tujuan misi tersebut antara lain :
 - a. Memantapkan ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, ideologi negara, hak asasi manusia, pembauran bangsa dan kehidupan antar umat beragama.
 - b. Meningkatkan kemandirian Partai Politik, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, LSM.
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik.
 - d. Mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - e. Melaksanakan pemilu yang aman dan tertib.
 - f. Meningkatkan pengertian bahaya penyalahgunaan narkoba, dan penggunaan miras.



- g. Meningkatkan kegotong-royongan masyarakat, antar umat beragama, melalui Lembaga FKUB dan FPBI untuk kesatuan, persatuan dan ketahanan bangsa.
- h. Meningkatkan pelayanan Administrasi Umum dibidang perencanaan dan pelaporan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan kearsipan.

2. Arah Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) dalam upaya menciptakan kerukunan antar pemeluk agama dan menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa di kalangan masyarakat.
- b. Fasilitasi Partai Politik dalam rangka kemandirian Partai Politik dengan memberikan bantuan keuangan bagi Partai Politik.
- c. Meningkatkan keharmonisan antar Partai Politik dan penambahan pengetahuan berpolitik dengan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
- d. Peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara, cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi masyarakat, pelajar dan anggota organisasi kemasyarakatan.



- e. Menciptakan suasana aman tenteram dalam setiap pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur, Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati dan Pemilu Kepala desa di semua wilayah.
- f. Meningkatkan pemantauan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing dalam rangka kewaspadaan dan keamanan wilayah.
- g. Penambahan pengetahuan bagi masyarakat dan pelajar akan rasa aman dengan daerah bebas narkoba.
- h. Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mengupayakan partisipasi masyarakat dalam ikut membantu memberikan informasi keadaan dan masalah aktual dan faktual.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.



Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

Tabel 2.1.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rumus Perhitungan

No	Tujuan	Idikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Meningkatnya Indeks Ketenteraman Sosial dan Keagamaan ((Persentase penurunan pelanggaran hukum + persentase prasarana keagamaan) / 2	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Dengan rumus : (Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang telah mendapat



				pembinaan/Jumlah Ormas, LSM dan OKP x 100)
2.	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Tercapainya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pemilu	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilihan umum (Jumlah Pemilih yang Datang ke TPS Menggunakan Hak Pilihnya / Jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100)
3.	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba	Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia	Cakupan rehabilitasi kasus narkoba. (Jumlah kasus yang terehabilitasi



		dan tumbuhnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba		/ jumlah kasus yang ada dikalikan 100)
--	--	--	--	--



A. Capaian Kinerja Organisasi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen selaku Organisasi Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mengacu pada sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yang tercantum dalam dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran.

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2019 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 3.2 . Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dari 3 (tiga) indikator kinerja utama telah memenuhi target telah ditetapkan.



Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

No	Indikator Sasaran	2018		2019		Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2018 terhadap 2019
		Target%	Realisasi%	Target%	Realisasi%		
1.	Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.	76,40	77	80	110,5	90	93,75
2.	Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilu.	0	0	0	71,94	70%	71,94%



3.	Cakupan rehabilitasi kasus narkoba	5,13	7,69	12,82	33,3	17,95	20,49
----	------------------------------------	------	------	-------	------	-------	-------

3.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat

	Indikator Sasaran	2018			2019			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2018 terhadap 2019
		Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi		
1.	Capaian peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	76,40	77	100,78	80	110,56	138,2	90%	93,75



3.2.2. Capaian Kinerja Tahun 2019.

Rata-rata persentase capaian indikator sasaran pertama s/d Desember tahun 2019 sebesar 110,56% hal ini memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target Tahun 2018 dengan realisasi 77%. Dari hasil evaluasi indikator kinerja peningkatan jumlah dan nilai capaian kinerja sasaran sebesar 33,56%. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran pertama sebesar 110,56% melebihi target.

3.2.3. Perbandingan Kinerja Tahun Lalu dan Akhir Periode Perencanaan.

Realisasi kinerja tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik. Indikator sasaran pada tahun 2019 capaian kinerjanya sebesar 110,56%. Dengan demikian indikator sasaran tahun 2019 telah mencapai target.

3.2.4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

- a. Dari evaluasi kinerja dapat diketahui faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diatas adalah dalam program pengembangan wawasan kebangsaan yang secara langsung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan generasi muda dalam menciptakan rasa persatuan dan kesatuan.
- b. Walaupun kinerja dapat dicapai dengan baik namun masih ada kendala yaitu belum maksimalnya dalam pelaksanaan sosialisasi terbukti belum seluruh Ormas, LSM, OKP bisa mengikuti kegiatan dimaksud.

3.2.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan :



- a. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan kegiatan pendayagunaan potensi organisasi kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 89.118.000, realisasi Rp. 87.460.800 terdapat efesiensi 1.657.200.
- b. Program peningkatan peran serta kepemudaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan dengan anggaran Rp. 34.657.000, realisasi 34.486.500, terdapat efesiensi Rp. 170.500,-

Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja telah memenuhi target dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1.827.700.

3.2.6. Analisis Program Kegiatan Pendukung Kinerja

Pelaksanaan kinerja Sasaran diatas dilakukan melalui sejumlah program dan kegiatan yaitu :

- a. Program peningkatan peran serta kepemudaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan.
- b. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan kegiatan pendayagunaan potensi organisasi masyarakat.



3.2.1. Capaian Kinerja Sasaran / Indikator sasaran.

Capaian partisipasi masyarakat /penduduk dalam proses pemilu

No	Indikator Sasaran	2018			2019			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2018 terhadap 2019
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi		
2.	Capaian partisipasi masyarakat / penduduk dalam proses pemilu	0	0	0	70	71,94	101,45	70	71,94



3.2.2. Capaian Kinerja Tahun 2019.

Rata-rata capaian indikator sasaran diatas s/d bulan Desember 2019 sebesar 71,94% dengan target 70% hal ini telah memebuhi target yang telah ditetapkan. Capaian diperoleh dari membandingkan target Tahun 2016 dengan realisasi 64,84%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran tersebut telah memenuhi target yang telah ditentukan. Untuk mendukung capaian kinerja tersebut dengan melaksanakan sosialisasi dan pemahaman pemilu serentak 2019 di 7 (tujuh) dapil dan 1 (satu) penyuluhan kepada masyarakat perempuan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 2019, terbukti tingkat partisipaso masyarakat dalam pemilu serentak 2019 meningkat hingga mencapai 71,94% dimana realisasi dihitung melalui jumlah pemilih yang hadir dibagi jumlah daftar pemilih dikalikan 100. Tahun 2015 tingkat kehadiran hanya mencapai 64,95%, Tahun 2018 Pilgub Jateng tingkat kehadiran 64,80% dan Tahun 2019 pelaksanaan pilek serentak dengan pilpres dengan capaian 71,94%. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya dikarenakan pemilih tersebut berada di luar kota, faktor pekerjaan, karena sakit, sekolah di luar kota dan tidak diberlakukan libur nasional.

3.2.3. Perbandingan Kinerja Tahun Lalu dan Akhir Periode Perencanaan

Realisasi capaian kinerja tahun 2019 anggaran Rp. 371.325.000,- realisasi 369.292.341 (99,45%), menunjukkan kinerja yang lebih baik



dibanding kinerja tahun 2018 sebesar Rp.178.259.300 dari anggaran Rp 180.000.000,-.

3.2.4. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dari evaluasi kinerja dapat diketahui faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut diatas disebabkan karena semakin bertambahnya peserta yang mengikuti sosialisasi dan pemahaman untuk mendukung Pemilu serentak tahun 2019 serta penyusunan perencanaan yang semakin cermat dibanding tahun 2018.

3.2.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program Pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dengan anggaran 74.265.000 realisasi 72.953.218 (98,23%) terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.311.782 (1,7%), kegiatan forum-forum diskusi politik anggaran 297.060.000,- realisasi Rp. 296.339.123 (99,76) terdapat efisiensi sebesar Rp. 720.877 (0,24).

3.2.6. Analisis Program Kegiatan Pendukung Kinerja

Pelaksanaan kinerja sasaran dilakukan melalui program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.
2. Kegiatan forum-forum diskusi politik.



3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran.

Cakupan rehabilitasi kasus narkoba

No	Indikator Sasaran	2018			2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019
		Target%	Realisasi%	Realisasi%	Targe%	Realisasi %	Realisasi %		
3.	Cakupan rehabilitasi kasus narkoba	5,13	10,26	200	12,82	33,3	259,75	17,95	21,78



3.2.2 Capaian Kinerja Tahun 2019.

Capaian indikator sasaran diatas untuk tahun 2019 melaksanakan sosialisasi P4GN (penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan gelap narkoba), sidak narkoba dan pemilihan duta pelajar anti narkoba dalam rangka peringatan HANI (Hari Anti Narkoba Internasional) 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 700 orang. Dari hasil evaluasi indikator capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran tersebut telah memenuhi target dengan jumlah peserta 700 orang. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik.

3.2.3 Perbandingan Kinerja Tahun Lalu dan Akhir Periode Perencanaan

Realisasi kinerja tahun 2019 dan 2018 menunjukkan kinerja seimbang. Dari indikator tersebut pada tahun 2018 jumlah peserta sosialisasi 700 orang dan 2019 jumlah peserta sama sebanyak 700 orang. Rata-rata persentase capaian kinerja tahun 2019 yaitu 100%. Dengan demikian indikator sasaran tersebut telah mencapai target.

3.2.4 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dari evaluasi kinerja dapat diketahui faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diatas adalah bahwa telah terlaksananya sosialisasi P4GN sehingga masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan, pencegahan, peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba pemahamannya meningkat, namun mengingat jumlah yang mengikuti sosialisasi narkoba tidak sebanding dengan jumlah usia remaja / kelompok sasaran sehingga pengguna narkoba di Kabupaten Kebumen semakin meningkat terbukti dengan peningkatan jumlah kasus



narkoba, hal ini harus ditindak lanjuti dengan peningkatan kegiatan sosialisasi belum dilakukan disemua tingkatan dengan mengasumsikan bahwa masyarakat yang telah tersosialisasi secara masif tentang bahaya narkoba adalah 10% dari kelompok sasaran (tingkatan SLTP keatas) sehingga peserta akan dapat menjadi agen dalam melakukan kampanye perang melawan narkoba di Kabupaten Kebumen.

3.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba (P4GN) sebesar Rp.168.334.000 realisasi 164.719.000 (97,85). Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah memenuhi target, terdapat efesiensi sebesar sebesar Rp. 3.615.000 (2,15%).

3.2.6 Analisis Program Kegiatan Pendukung Kinerja

Pelaksanaan kinerja sasaran tersebut dilakukan melalui program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dengan kegiatan Penyuluhan, pencegahan, peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba (P4GN).

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan digunakan untuk mengetahui seberapa besar alokasi dan penyerapan anggaran yang dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Penyerapan anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah anggaran 2.345.779.000,- terserap sebesar Rp.2.242.869.932,-

KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN KEBUMEN



(95,61%). Anggaran dan realisasi belanja langsung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 tertera pada Tabel 3.3.



Tabel 3.3.
Realisasi Anggaran Program / Kegiatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen
Tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan Kantor.	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
				Penyediaan jasa surat menyurat	2.475.000	2.274.000	91,87
				Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.676.000	28.651.040	87,68
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	54.461.000	40.283.163	73,96
				Penyedia jasa administrasi keuangan	44.559.000	44.557.600	99,99

KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN KEBUMEN



				Penyediaan jasa kebersihan kantor	32.676.000	32.588.400	99,73
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.843.000	13.343.000	84,22
				Penyediaan alat tulis kantor	9.902.000	9.769.300	98,65
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.902.000	9.715.000	98,11
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4.951.000	4.871.000	98,38
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.931.000	6.756.500	97,48
				Penyediaan makanan dan minuman	9.902.000	9.280.000	93,71
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	69.314.000	69.290.025	99,96
				Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	9.902.000	9.830.000	99,27

KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN KEBUMEN

2	Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor			
				Pengadaan mebeleur	17.328.000	17.325.000	99,98
				Pengadaan sarana dan prasarana kantor	91.098.000	85.980.960	94,38
				Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	26.735.000	25.358.000	94,84
				Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	9.902.000	9.783.000	98,79
3	Tersedianya kebutuhan untuk penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Tersedianya kebutuhan untuk penyusunan	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Program Pengembangan Data / Informasi			
				Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	21.784.000	19.977.000	91,70



	dan iktisar realisasi kinerja tiap bulan, renja dan lakip.						
4	Rakor kominda, rakor evaluasi kamtibmas dan jumlah informasi intelijen melalui kominda dan FKDM	Terwujudnya masyarakat yang tentream dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Penurunan kasus pelanggaran hukum	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan			
				Pengendalian keamanan lingkungan	198.040.000	155.146.000	78,34



5	Menciptakan masyarakat yang tenteram	Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Penurunan kasus pelanggaran hokum	Program pengembangan wawasan kebangsaan			
				Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	59.412.000	57.312.048	96,46
				Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	544.610.000	543.384.500	99,77
				Kegiatan penguatan penghayatan ideologi pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat	69.314.000	65.004.190	93,78



				Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			
				Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	78.225.000	75.824.376	96,93
				Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	69.314.000	64.879.000	93,60
				Pendayagunaan potensi organisasi masyarakat	89.118.000	87.460.800	98,14
6		Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib berdasarkan kesadaran	Penurunan kasus pelanggaran hukum	Program Pendidikan Politik Masyarakat			
				Penyuluhan kepada masyarakat	74.265.000	72.953.218	98,23
				Kegiatan forum-forum diskusi politik	297.060.000	296.339.123	99,75



		atas hukum					
7	Menciptakan masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berakhlak mulia	Cakupan rehabilitasi kasus narkoba	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			
				Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	168.334.000	164.719.000	97,85
		Terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Penurunan kasus pelanggaran hukum	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			
				Pembinaan Organisasi Kepemudaan	34.657.000	34.486.500	99,50
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			
				Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial	128.726.000	122.969.031	95,52
				Penunjang bantuan keuangan /	49.510.000	48.187.250	97,32

KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN KEBUMEN



				bantuan sosial			
--	--	--	--	----------------	--	--	--



A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2019 dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Dari uraian pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten untuk seluruh sasaran strategis di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2019 sebesar 95,61%;
2. IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sudah mencapai target yang ditetapkan 2019 sebesar 70% dan capaiannya 71,94%.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam pencapaian target kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2019 tetap memerlukan dukungan dari berbagai pihak terutama untuk bantuan keuangan, bagi pihak penerima untuk dapat memaksimalkan pengusulan dan pemenuhan persyaratan administrasi.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2019 yang dapat kami susun dan laporkan semoga dapat lebih memacu kinerja aparat khususnya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya serta masyarakat pada umumnya.

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

NURTAQWA SETYABUDI, S.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19650521 199203 1 009